

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA ENU KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA

Tiansi Yolanda Anasa^{1)*}, Intam Kurnia²⁾, Syarif Permana Salingkat³⁾

¹Mahasiswa Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako
tiansiyolandaa@gmail.com

² Pembimbing Utama Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako
kintam.68@gmail.com

³ Pembimbing Pendamping Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako
spsalingkat@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Pencegahan Stunting di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Konsep teori yang digunakan yaitu Model Implementasi Kebijakan menurut Edward III, meliputi 4 (empat) aspek yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian yaitu berjumlah 7 (tujuh) orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif meliputi pengumpulan data (*data collection*), kodensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Stunting di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala masih terdapat beberapa kendala dan perlu ditingkatkan. Terdapat 3 (tiga) aspek yang mengalami masalah yaitu komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi yaitu kurangnya komunikasi yang dilakukan pihak pemerintah desa kepada masyarakat. Aspek sumberdaya masih kurang disebabkan karena kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana seperti jumlah tenaga kesehatan bidan desa yang masih kurang, serta anggaran dana stunting yang belum dioprasikan. Aspek struktur birokrasi yaitu proses kerja dari pihak pemerintah tentang pencegahan stunting yang belum berjalan dengan baik. Kesimpulan penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Stunting di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Sehingga, dapat disarankan yaitu Pemerintah Desa Enu diharapkan untuk lebih peduli dan berpartisipasi serta berperan aktif kepada masyarakat dalam menangani kasus stunting yang ada di Desa Enu. Selain itu, anggaran Stunting harus dimaksimalkan bagi penanggulangan Stunting di Desa Enu.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Stunting

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the Implementation of Stunting Prevention in Enu Village, Sindue District, Donggala Regency. The theoretical concept used is the Policy Implementation Model according to Edward III, which includes 4 (four) aspects, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The research method used is qualitative descriptive. Data collection techniques consist of observation, interviews and documentation. The research informants amounted to 7 (seven) people using purposive sampling technique. The data analysis used is an interactive model including data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing/verification. Based on the results of research in the field, the Implementation of the Stunting Prevention Program Policy in Enu Village, Sindue District, Donggala Regency still has several obstacles and needs to be improved. There are 3 (three) aspects that experience problems, namely communication, resources and bureaucratic structure. The communication aspect is the lack

of communication by the village government to the community. The resource aspect is still lacking due to the lack of availability of Human Resources (HR) and infrastructure such as the number of village midwives who are still lacking, and the stunting fund budget that has not been operated. The bureaucratic structure aspect is the work process of the government regarding stunting prevention that has not gone well. The conclusion of the research is that the Implementation of the Stunting Prevention Program Policy in Enu Village, Sindue District, Donggala Regency has not been fully implemented properly. So, it can be suggested that the Enu Village Government is expected to be more concerned and participate and play an active role in the community in handling stunting cases in Enu Village. In addition, the stunting budget must be maximized for stunting prevention in Enu Village.

Keyword: Implementation, Policy, Stunting

Submisi: 30/01/2024

Diterima: 31/01/2024

Dipublikasikan: 31/01/2024

PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang masuk dalam pravelensi stunting diatas pravelensi nasional menurut dari hasil survei Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia Pada Tahun 2019. Adapun salah satu daerah diwilayah provinsi Sulawesi Tengah yang memperlihatkan data stunting yaitu Kabupten Donggala khususnya di daerah Kecamatan Sindue Desa Enu. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah telah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi Dan Stunting pasal 13 ayat 1 bahwa, aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan melalui 5 (lima) pilar, yang meliputi (a) komitmen dan visi pimpinan daerah; (b) kampanye/sosialisasi dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen pemangku kepentingan dan akuntabilitas; (c) konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat; (d) mendorong kebijakan nasional nutritional security; (e) pemantauan dan evaluasi. Penyebab balita mengalami stunting antara lain kurangnya asupan gizi selama ibu hamil, kebutuhan gizi anak yang tidak tercukupi setelah melahirkan, kemudian kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan termaksud layanan kehamilan dan setelah melahirkan serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Juga disebabkan oleh masih kurangnya akses mendapat makanan bergizi, (Pergub Sulteng, 2019).

Berdasarkan observasi bahwa Kabupaten Donggala sebagai wilayah kasus stunting tertinggi, Kabupaten Donggala menempati urutan pertama dengan jumlah kasus bayi yang mengalami stunting atau kekerdilan terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah dari total jumlah kasus stunting di Sulawesi Tengah sekitar 25 ribu orang pada tahun 2021. Dari total 25 ribu kasus stunting yang dilaporkan pada tahun 2021, Donggala berada di urutan pertama dengan presentase 26,2 persen. Data oleh Bidang Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Pada tahun 2019 memperlihatkan jumlah balita pendek (TB/U) 2.991 atau sebesar 31,6 % . Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2020 jumlah balita pendek (TB/U) 4.370 atau sebesar 27,1%. Sedangkan pada tahun 2021 angka ini mengalami penurunan jumlah balita pendek (TB/U) 3.692 atau sebesar 23,5%. Untuk wilayah Kecamatan Sindue hasil dari data memperlihatkan jumlah balita pendek (TB/U) pada tahun 2019 adalah 258 atau sebesar 47,7% sedangkan pada tahun 2020 angka ini mengalami penurunan jumlah balita pendek (TB/U) 131 atau sebesar 36,8% dan angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 jumlah balita pendek (TB/U) 175 atau sebesar 28,8% (Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala), untuk wilayah desa enu dari data memperlihatkan jumlah balita pendek (TB/U) pada tahun 2019 adalah 15 anak, sedangkan pada tahun 2020 angka ini mengalami kenaikan jumlah balita pendek (TB/U) 27 anak, dan angka ini mengalami penurunan pada

tahun 2021 jumlah pendek (TB/U) 12 anak, dan pada tahun 2022 angka ini mengalami kenaikan yaitu 54 anak yang mengalami stunting, (Puskesmas Toaya, 2022).

Pemerintah Kabupaten Donggala telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan mencegah penurunan stunting, salah satunya yaitu dengan melakukan program Tim Percepatan Penurunan Stunting atau biasa disebut dengan TPPS serta membentuk adanya Bank Gizi, Bank Gizi adalah organisasi non profit di bawah naungan yayasan sahabat hebat indonesia dengan misi membantu pemerintah dalam mengurangi angka stunting serta menekan angka kelaparan. program Ini diharapkan mampu mencegah percepatan penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Donggala. Dilihat dari secara Aspek Sosial bahwa masalah stunting yang terjadi di Desa Enu dimana kondisi kehidupan para Ibu belum memahami betul tentang pola asuh maupun cara hidup sehat serta belum memahami bagaimana cara untuk mencegah stunting, sedangkan pada Aspek Ekonomi kehidupan masyarakat yang berada didesa Enu masih berada ditaraf kehidupan yang kurang mampu, masih adanya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-seharinya, dan masih adanya masyarakat yang bergantung kepada bantuan dari pemerintah baik bantuan berupa sembako ataupun bantuan berupa uang tunai. berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan Implementasi Kebijakan di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dimana kebijakan aparat desa sangatlah penting guna untuk membantu tercapainya pelaksanaan program kebijakan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya dari masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya upaya pencegahan stunting akan dirasakan sehingga menjadi suatu kewajiban yang lahir secara spontan. Dari data stunting yang peneliti dapatkan balita yang mengalami stunting pada tahun 2021 dilihat dari aspek BB/U terdapat 23 anak, sedangkan TB/U 24 terdapat anak, (Dinkes Donggala, 2020). Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan program pencegahan Stunting di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala?

METODE

Dasar penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu menggunakan Model Implementasi Edward III terdiri atas, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan stuktur birokrasi. Jenis data yaitu gunakan data kualitatif yang bersumber dari data primer yaitu observasi dan wawancara serta sumber data sekunder yaitu data-data pelaporan dari dokumen terkait stunting. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu alat perekaman dan pencatatan tertulis dari peneliti. Analisis data yaitu model analisis interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) meliputi pengumpulan data (*data collection*), kodensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Definisi konsep untuk menganalisis Implementasi Program Pencegahan Stunting di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala menggunakan Model Implementasi Edward III, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan pencegahan stunting dapat dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi proses penyampaian program penanggulangan stunting seperti koordinasi antara pihak Dinas Kesehatan dengan pihak Puskesmas serta Posyandu, tentang kebijakan yang diberikan untuk program stunting. Unsur komunikasi yang dilihat dari penelitian ini adalah menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi kepada pelaksana

dan konsistensi yang tersampaikan.

a. Transmisi/penyebarluasan kebijakan

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi mengenai kebijakan program pencegahan stunting melalui sosialisasi ke masyarakat khususnya orang tua bayi dan ibu hamil sebagai Implementor kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan program pencegahan stunting di Desa Enu.

b. Kejelasan

Untuk mengetahui kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala dan Puskesmas Kecamatan Sindue dalam melaksanakan program pencegahan stunting.

c. Konsistensi

Konsisten dalam penelitian ini adalah bagaimana konsisten dari para pelaksana kebijakan dan anak/orang tua serta ibu hamil sebagai penerima kebijakan apakah konsisten dengan kebijakan program pencegahan stunting di Desa Enu.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tersebut, dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Adapun unsur sumber daya yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung kebijakan program pencegahan stunting.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan, kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan dan mengatur keuangan, baik penyediaan uang maupun pengadaan staf dan kader. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan harus terpenuhi seperti tempat posyandu, peralatan, serta dana yang mencakup.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh pelaksana atau implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Dapat juga diartikan bahwa pelaksana harus memiliki keinginan yang tulus untuk melaksanakan kebijakan seperti yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Sedangkan yang akan dilihat dari unsur sikap pelaksana dalam penelitian ini adalah persepsi pelaksana bagaimana respon pelaksana dan tindakan pelaksana terhadap kebijakan program pencegahan stunting.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang diartikan sebagai organisasi atau tempat pelaksana/implementasi kebijakan harus pula mendukung lancarnya pelaksana kebijakan. Unsur yang dilihat dari struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah pembentukan struktur birokrasi, pembagian tugas dan wewenang dari setiap pelaku kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

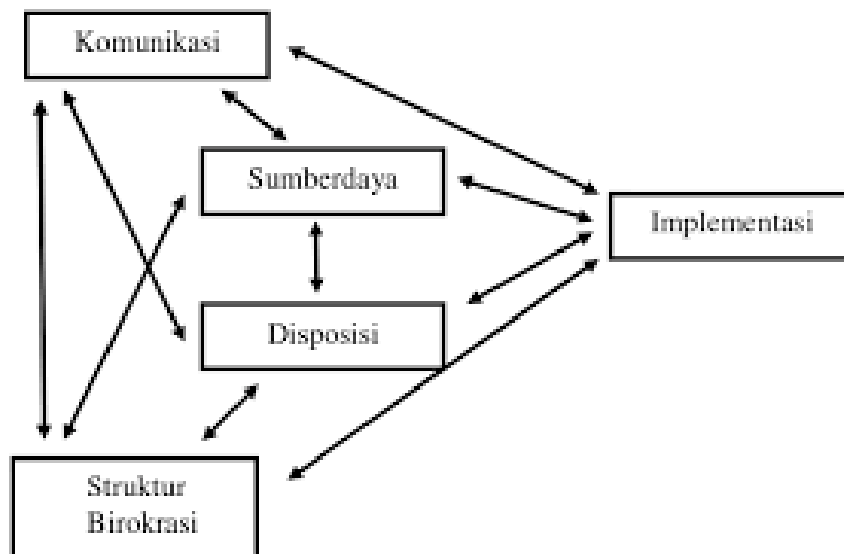
Kebijakan dalam perspektif sejarah, yaitu sebagai aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh William N. Dunn (2003: 89). Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama

harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan, (Thomas Dye, 1992; 2-4).

Kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi, (Nugroho, 2004: 7).

Model Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan perspektif *top-down* dan dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III bahwa model implementasi kebijakannya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Pendekatan konsep teori oleh Edward III, terdapat empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu terdiri dari (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi.



(Sumber: Winarno, 2004)

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Edward III

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisiian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga Indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu (1) Transmisi; (2) Kejelasan; dan (3) Konsistensi.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu :

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III adalah : (1) Efek Disposisi; (2) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); (3) Insetif.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar *Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan.
- b) Melaksanakan fragmentasi, yang tujuannya untuk menyebar tanggung jawab dengan berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Enu ditinjau dari segi Bahasa Kaili yang sangat sulit didefinisikan karena nama Enu tercetus dari sebuah bahasa spontan dari mulut sang pemimpin dengan gaya bahasa nya “*naenu*” (*nanggalako*) arti secara bahasa Indonesia petualang, jadi Enu dalam arti sesungguhnya “berpetualang”.

Desa Enu merupakan salah satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Sindue yang berdiri pada tahun 1920 yang letaknya 7 km dari Ibu Kota Kecamatan di Pesisir Pegunungan dengan luas 17.9 Ha yang terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun I Mbiratara, Dusun II Pandake, Dusun III Karumba dan Dusun IV Jono. Jumlah penduduk Desa Enu sebanyak 1.972 jiwa yang terdiri dari 845 jiwa laki-laki dan 880 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 543, dan jumlah penduduk miskin sebanyak 227 jiwa.

Berdasarkan data kasus Stunting di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif. Data Stunting Desa Enu Tahun 2019 yaitu 15 kasus, Tahun 2020 meningkat yaitu sebanyak 27 kasus Stunting. Tahun 2021 kasus Stunting di Desa Enu menurun yaitu sebanyak 12 kasus. Namun, Tahun 2022 kembali meningkat yaitu sebanyak 54 kasus.

**Tabel 1 Laporan Data Stunting
Desa Enu Tahun 2019-2022**

Tahun	Status Gizi Indeks BB/U				Status Gizi Indeks TB/U				Stunting
	Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Resiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	
2019	3	5	17	0	6	9	10	0	15
2020	6	21	66	2	8	19	54	0	27
2021	5	11	63	2	3	9	44	0	12
2022	7	31	105	2	13	41	90	0	54

(Sumber : Data Sekunder, Puskesmas Toaya Tahun 2019-2022)

Berbagai kendala yang Peneliti temukan di lapangan dalam kasus Stunting selama kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman Stunting dari pihak orang tua, beberapa anak tidak melakukan imunisasi secara lengkap, dan tidak mendapatkan asupan makanan yang baik dan sehat. Selain itu, telah dilakukan upaya kerjasama antara Pemerintah Desa Enu dan pihak Puskesmas melalui Posyandu Enu sehingga menghasilkan kebijakan anggaran Stunting yang peruntukkannya pada pembelian vitamin dan makanan sehat untuk Ibu hamil dan anak Stunting. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kerjasama tersebut kurang berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi dan juga tidak terserapnya anggaran Stunting.

Berdasarkan analisis pada masing-masing aspek teori dengan model implementasi Edward III, bahwa pada aspek komunikasi terdiri atas 3 sub aspek yaitu transmisi, di mana piha Dinas Kesehatan tetap menghimbau tentang penyusunan penganggaran dipuskesmas mengenai stunting dan memprogramkan kegiatan-kegiatan stunting dengan melakukan rembuk desa dan pelayanan posyandu yang berbarengan dengan program Standar Pelayanan (SPM) dan melakukan sosialisasi berupa rapat dengan seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Donggala. Dimana dengan harapan jika melakukan penghimpunan dan Sosialisai terhadap kepala puskesmas dengan melakukan rembuk desa dan pelayanan terhadap pihak posyandu dapat dengan mudah menjalankan kebijakan pencegahan stunting.

Sub aspek kejelasan, di mana penyampaian informasi tentang penanganan pencegahan stunting di desa enu antara pihak posyandu kepada pemerintah desa dan masyarakat sudah berjalan dengan baik, dari pihak posyandu sudah turun langsung dalam memberikan sosialisasi tentang pencegahan stunting kepada masyarakat, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang terjadi, seperti dari pihak pemerintah desa yang belum menjalankan kebijakan pencegahan stunting di desa enu.

Sub aspek konsistensi, bahwa tugas kader posyandu dalam menangani pencegahan stunting sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat kendala dari dana stunting yang tidak diberikan oleh pemerintah desa enu tetapi dari kader posyandu selalu mengupayakan bagaimana pun caranya agar anak yang berdampak stunting mendapatkan pelayanan dengan baik agar stunting yang berada di Desa Enu dapat mengurang.

Aspek komunikasi, bahwa antara puskesmas dan posyandu kepada pemerintah desa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak menggunakan anggaran stunting. Selain itu, pihak Dinas Kesehatan Donggala hanya memberikan arahan dan himbauan kepada kader Posyandu dan Puskesmas tetapi tidak mengawasi pemberian anggaran program stunting yang ada di Desa Enu.

Aspek sumber daya sebagai salah satu faktor penting dalam proses implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan. Jika sumber daya yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan jumlahnya kurang memadai, maka implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Sumber Daya kebijakan menyangkut jumlah dan kompetensi staff yang sesuai dengan kebutuhan, informasi yang relevan dan memadai tentang cara untuk melaksanakan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang

berkaitan dengan implementasi kebijakan, adanya kewenangan yang memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan sebagaimana mestinya, berbagai dukungan fasilitas (termaksud bangunan, peralatan, dan lain semestinya) dimana dengan adanya hal tersebut secara memadai dapat dilakukan pelayanan. Aspek sumber daya kurang baik, yaitu Pemerintah Desa Enu kurang berperan dengan baik dalam mengoptimalkan anggaran Stunting, dan kurangnya perlengkapan alat kesehatan serta keterbatasan kemampuan dari para Kader karena bukan berasal dari tingkat pendidikan kesehatan.

Aspek Disposisi atau sikap dari para implementor merupakan faktor kritis ketiga di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan publik. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Begitupun sebaliknya jika para pelaksana bersikap negatif dan menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala. Aspek disposisi kurang baik yaitu antara Dinas Kesehatan Donggala, TPPS Donggala, dan Puskesmas serta Posyandu dinilai kurang baik dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak Stunting serta kurang tanggapnya pihak yang berkepentingan dalam melakukan pencegahan Stunting.

Aspek Struktur Birokrasi sebagai suatu prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan di dalam pelaksanaan suatu kebijakan. adapun struktur birokrasi yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. adanya pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas akan mencegah untuk tidak terjadinya ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan. Aspek struktur birokrasi yaitu pihak yang berkepentingan dalam kasus Stunting, sudah melakukan beberapa upaya tetapi belum sesuai dan belum sepenuhnya menerapkan Kebijakan Stunting di Desa Enu sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara serta dari beberapa data sekunder bahwa kesimpulan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Stunting di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang dilihat dari empat aspek Implementasi Kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, antara Dinas Kesehatan Donggala, TPPS Donggala, dan Puskesmas serta Posyandu diharapkan untuk lebih peduli dan berpartisipasi serta berperan aktif kepada masyarakat dalam menangani kasus stunting yang ada di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Loe. 2003, Dasar Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Anggara, Sahya. 2016, Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Anggara, Sahya. 2018, Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Aryu, Candra, 2020, Epidemiologi Stunting, Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
Dunn, William N. 2001, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press.
Eko Handoyo. 2012, Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya
Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017, Metode Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus. Jawa Barat: CV Jejak

- Mahi, M Hikmat. 2001, Metode Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Milles, Matthew B & A Michael Hubberman, 2007, Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: UI Press.
- Milles, MB & Hubberman, AM, 2002, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto. Jakarta: UI Percetakan
- Pasolong, Harbani. 2019, Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2014, Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Pandji. 2008, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2008, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2010, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003, Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.
- Wahab, Solihin Abdul. 1990, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta
- Winarno, 2004, Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Dokumen

- Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 17 Tahun 2021 Tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting.
- <https://sulteng.antaranews.com/berita/242233/kasus-stunting-di-donggala-terbanyak-di-provinsi-sulteng>.

C. Sumber Lain

- Dewi, *et. al.* 2022. Implementasi Program Pencegahan Stunting di Puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora. Vol. 1 No. 2 Juli 2022
- Dian, *et. al.* 2022. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, social, Humaniora dan Kebijakan Publik. Vol. 4 No. 4 Desember 2021
- Qotrun, *et. al.* 2022. Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Karawang. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol. 7 No. 1 Januari 2022
- Rahma, *et. al.* 2021. Pencegahan Stunting Melalui Program Gemarikan oleh Posyandu di Kabupaten Jepara. Semarang Universitas Diponegoro
- Wiji, *et. al.* 2019. Implementasi Strategis Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil. Jurnal of Healthcare Technology and Medicine. Vol. 7 No. 1 April 2021.

TENTANG PENULIS

A. Identitas Diri

1. Nama : Tiansi Yolanda Anasa
2. Nomor Stambuk : B 101 19 166
3. Tempat Tanggal Lahir : Enu, 24 Maret 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Trans Palu Sabang
7. No. Hp : 085734278400
8. Alamat E-Mail : tiansiyolandaa@gmail.com



B. Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Anton
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Agama : Islam
 - d. Alamat : Enu
2. Ibu
 - a. Nama : Fatmawati
 - b. Pekerjaan : IRT
 - c. Agama : Islam
 - d. Alamat : Luwuk Banggai

C. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD Negeri 10 Sindue Pada Tahun 2013
2. Tamat SMP Negeri 4 Sindue Pada Tahun 2016
3. Tamat SMA Negeri 1 Sindue Pada Tahun 2019
4. Masuk di Universitas Tadulako Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Tahun 2019